

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dekade terakhir, pemerintah daerah telah mengalami transformasi dalam memenuhi kewajiban akuntabilitas mereka. Sebelumnya, pelaporan keuangan yang dihasilkan dalam bentuk kertas menjadi pelaporan keuangan berbasis web yang dapat diakses oleh semua kalangan dimanapun dan kapanpun. Internet telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan di pemerintah daerah. Kehadiran internet telah menghapus batas dan jarak terhadap tersedianya sebuah informasi. Internet dapat digunakan sebagai media dalam mencari dan bertukar informasi.

Pada tahun 2016 menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 132,7 juta dengan alasan utama mengakses internet adalah mencari informasi (<https://apjii.or.id/downfile/file/surveipenetrasiinternet2016.pdf>). Pertumbuhan volume pengakses informasi yang tersedia di internet ini mengharuskan pemerintah daerah menyediakan informasi keuangan yang dapat diakses dengan mudah agar terciptanya suatu akuntabilitas. Akuntabilitas dianggap penting karena merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu lembaga terhadap sistem administrasinya.

Pemerintah dianggap sebagai *agent* dimana dalam menjalankan fungsinya diharapkan dapat memberikan *signal* yang baik kepada masyarakat. Masyarakat ingin

mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengelola daerahnya dan nantinya masyarakat dapat menilai apakah pemerintah daerah telah menjalankan fungsinya dengan baik. Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat pemerintah daerah dapat memanfaatkan internet sebagai sarana dalam pelaporan keuangan itu.

Pemanfaatan dan pengembangan internet dalam menyampaikan informasi adalah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangannya agar tercipta badan publik yang bersifat transparan dan bertanggung jawab atas setiap informasi. Hal ini pun dimuat dalam UU no 14 tahun 2008 tentang informasi publik yang harus bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik. Penelitian yang telah dilakukan oleh Arifin & Rosita, (2017) menyatakan bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mudah mengakses *website* yang telah disediakan. Hal ini yang dapat mendorong minat masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam program pemerintah.

Pelaporan keuangan di internet sebenarnya merupakan cara pemerintah daerah agar terlegitimasi, artinya dengan adanya pelaporan keuangan di internet pemerintah daerah dapat meyakinkan masyarakat dan *stakeholder* bahwa penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan aturan Alhajjriana *et al.*, (2014). Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat dalam menginformasikan keuangan atas kinerja keuangannya dalam suatu periode. Pemerintah daerah masih minim untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam

menyampaikan informasi terkait anggaran dan laporan keuangan yang menjadi hak dari masyarakat. Hal itu dapat menjadi salah satu kendala mengingat jumlah penduduk yang besar serta wilayah yang luas. Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi pemerintah daerah dalam menungkapkan laporan keuangannya.

Pendapatan daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 adalah semua hak daerah yang dapat diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah yang tinggi harusnya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dan dapat dibuktikan melalui laporan keuangan. Penelitian Alhajjriana *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet sedangkan penelitian Pratama *et al.*, (2015) menunjukkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

Belanja daerah menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah "kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih". Penelitian Alhajjriana *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet. Belanja daerah yang dapat teralokasi dengan tepat ke pos-pos belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Zebua, (2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alhajjriana *et al.*, (2014) dan Pratama *et al.*, (2015) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pelaporan

keuangan di internet. Belanja daerah dapat dijadikan indikator dalam mengukur tingkat pengungkapan informasi keuangan di internet.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintah daerah bersama pemerintah daerah. UU No 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa DPRD memiliki hak untuk meminta keterangan terhadap pemerintah daerah, hak mengajukan pernyataan pendapat, dan hak untuk mengadakan penyelidikan. DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah juga memiliki fungsi untuk mendistribusikan keuangan kepada masyarakat melalui berbagai pelayanan dan bersifat membangun untuk berbagai kebutuhan masyarakatnya Rossevelt & Domai, (2014). Jumlah anggota DPRD diharapkan dapat menjadi indikator dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik, sehingga pemerintah daerah terdorong untuk dapat melaporkan laporannya di internet.

Penduduk memiliki peran penting dalam pemerintah daerah karena dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan yang cepat membuat pemerintah daerah harus memikirkan taraf kehidupan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan. Penduduk yang tinggal di suatu daerah juga harus turut berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah yang mengharuskan pemerintah daerah menyediakan dana besar untuk menyampaikan informasinya kepada penduduk yang jumlahnya besar. Penelitian Hilmi & Martani, (2012) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan

oleh Alhajjriana *et al.*, (2014) tidak menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet.

Rasio pembiayaan hutang (*leverage*) pada pemerintah daerah digunakan untuk mengukur perbandingan kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah daerah dengan total hutang Hadi, (2010). Dalam sektor publik rasio pembiayaan hutang (*leverage*) dianggap penting karena memberikan sebuah keputusan terhadap pemberian kredit diantara debitur dan kreditur. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi, (2010) menunjukkan bahwa rasio pembiayaan hutang (*leverage*) berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nosihana & Yaya, 2016) menunjukkan bahwa Rasio pembiayaan hutang (*leverage*) tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet.

Penelitian sebelumnya masih menunjukkan ketidak konsistenan dan hal ini yang memotivasi peneliti untuk melanjutkan penelitian dari penelitian sebelumnya yang akan dilakukan pada pemerintah daerah tingkat II di Pulau Sumatra. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat jika menginginkan untuk mengetahui transparansi dari laporan keuangan diharapkan dapat memperolehnya dengan mencari tahu melalui *website* resmi milik pemerintah daerah dan penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi dalam bidang akuntansi tentang pelaporan keuangan di website pemerintah daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Alhajjriana *et al.*, (2014) yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambah variabel

independen rasio pembiayaan utang (*leverage*) dan menghapus variabel implikasi terhadap laporan keuangan. Penambahan variabel independen rasio pembiayaan utang (*leverage*) ini dikarenakan semakin tinggi *leverage* maka ketergantungan yang ditimbulkan kepada pihak luar (*kreditur*) semakin tinggi oleh pemerintah daerah (*debitur*) yang dapat mengakibatkan ketatnya pengawasan yang ditetapkan oleh *kreditur* yang membuat pemerintah daerah semakin ingin mempublikasikan laporan keuangannya secara transparan. Peneliti menghapus variabel implikasi terhadap laporan keuangan dikarenakan pengukuran dari variabel independen itu juga diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bersifat akuntabel serta dapat mendorong pemerintah untuk mempublikasikannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian ini dengan judul “**Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah (studi pada pemerintah daerah tingkat II di pulau Sumatra tahun 2015-2017)**”

B. Batasan Masalah

Banyaknya permasalahan yang dapat ditemukan dalam penelitian ini membuat penulis harus membuat batasan batasan pada penelitian agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang sudah direncanakan, batasan tersebut adalah:

1. Determinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan daerah, belanja daerah, jumlah anggota DPRD, jumlah penduduk, dan rasio pembiayaan hutang (*leverage*).
2. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah tingkat II di Pulau Sumatra.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan daerah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah?
2. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah?
3. Apakah jumlah anggota DPRD berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah?
4. Apakah Jumlah penduduk berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah?
5. Apakah rasio pembiayaan utang (*leverage*) berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari uraian masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pendapatan daerah terhadap pelaporan keuangan di internet
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh belanja daerah terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh jumlah anggota DPRD terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh jumlah penduduk terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah
5. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh rasio pembiayaan hutang (*leverage*) terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang gambaran informal dari pelaporan keuangan di *website* pemerintah daerah dan diharapkan dapat memperkaya kajian teori dari pelaporan keuangan tersebut.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi terkait proses dalam pelaporan keuangan di *website* pemerintah daerah, dan diharapkan penelitian ini dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah bahwa pelaporan keuangan di *website* pemerintah daerah dianggap penting agar citra pemerintah daerah sebagai badan publik yang transparan dan akuntabilitas dapat terwujud.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat mendorong masyarakat agar terlibat dalam program pemerintah dan dapat melihat bagaimana kinerja pemerintah yang baik dengan melihat dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaporan tersebut agar tercipta pemerintah yang bersih.